

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BERBASIS RUKUM WARGA (PMB-RW) DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**FUAD FATHIN FADHLILLAH**  
**NPM. 157310331**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fuad Fathin Fadhlillah  
Npm : 157310331  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru ,22 Desember 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

**Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si**

**Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fuad Fathin Fadhlillah  
 Npm : 157310331  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Skripsi : Impelementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan-Ketentuan metode penelitian ilmiah, Oleh Karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik, dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana

Pekanbaru ,22 Desember 2020

Ketua, Sekretaris,

**Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si**

**Syaprianto, S. Sos, M.IP**

Anggota

**Dr. Zainal, S.Sos, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan 1

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fuad Fathin Fadhlillah  
 Npm : 157310331  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Sanggar Kegiatan Belajar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi Persyaratan Administrasi dan Akademis, Oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru ,15 Desember 2020

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si**

**Syaprianto, S.Sos, M.IP**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan pengajuan judul usulan penelitian ini sehingga sampai pada Skripsi yang layak di ujiankan

4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk di ujikan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.
6. Untuk teman teman saya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama perkuliahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Penulis

Fuad Fathin Fadhilillah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	11
1. Konsep Pemerintahan .....	11
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
3. Konsep Kebijakan Publik .....	16
4. Konsep Implementasi Kebijakan .....	19
5. Konsep Pemberdayaan.....	20
6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	32
a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	34
b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Konsep Operasional.....	39
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan dan Key Informan .....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44

F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Jadwal Penelitian .....	46
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	47

#### **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran umum Kecamatan Tenayan Raya .....	49
B. Visi Kecamatan Tenayan Raya .....	50
C. Arti Filosofi dengan Visi .....	50
D. Gambaran Umum Kelurahan Bambu Kuning.....	52
E. Visi dari Kelurahan Bambu Kuning .....	53
F. Struktur Organisasi Kelurahan Bambu Kuning .....	54
G. Jumlah Penduduk Kelurahan Bambu Kuning.....	55
H. Gambaran Umum Kelurahan Tuah Negeri .....	56
I. Konsep Membangun Kelurahan Tuah Negeri .....	58

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas informan .....	59
1. Jenis Kelamin .....	59
2. Pendidikan.....	60
3. Umur .....	61
B. Hasil dan Pembahasan .....	62
1. Komunikasi .....	64
a. Adanya sosialisasi Kepada Masyarakat .....	65
2. Sumber Daya.....	67
a. Tersedianya Personil yang cukup .....	68
b. Tersedianya Fasilitas yang mendukung.....	69
3. Disposisi.....	72
a. Adanya kendala dalam pelaksanaan Program .....	73
4. Struktur Birokrasi.....	75
a. Adanya kejelasan fungsi dan wewenang instansi terkait .....	76
b. Adanya koordinasi antar pihak terkait.....	78
C. Faktor Penghambat .....	80

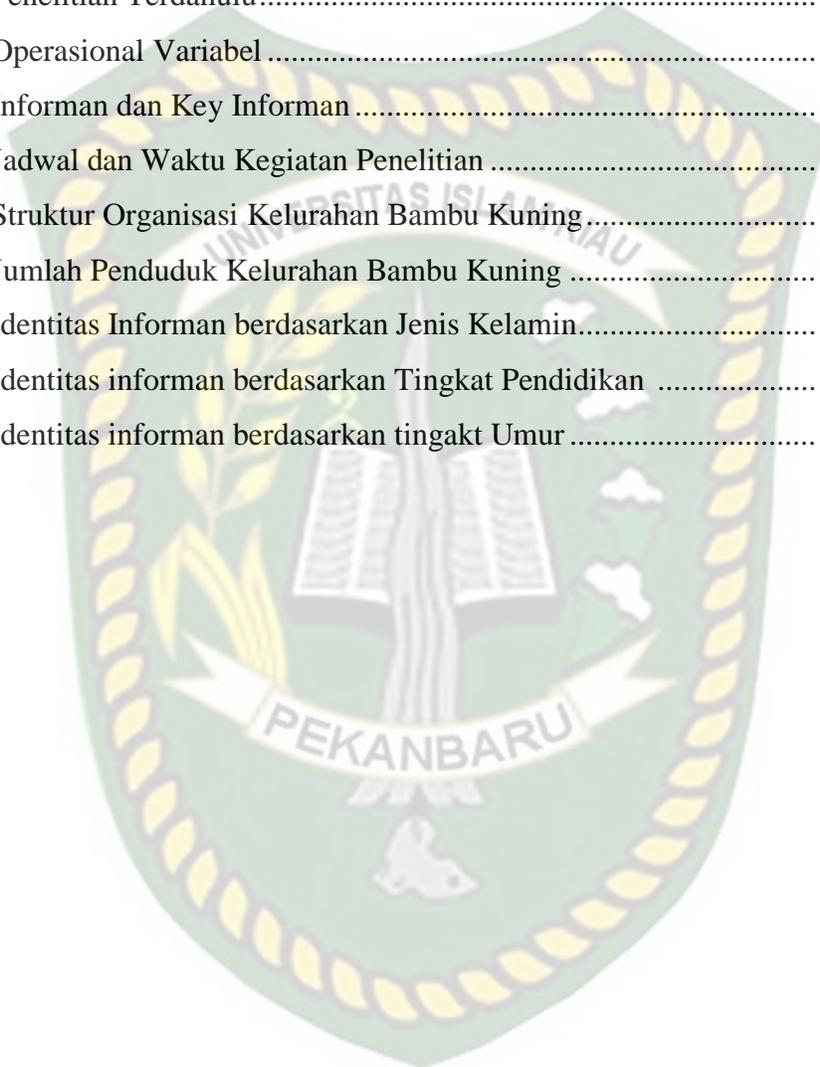
#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>84</b>
---------------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Rekapitulasi Kegiatan PMB-RW tahun 2019.....	8
II.1 Penelitian Terdahulu.....	37
II. 2 Operasional Variabel.....	41
III.1 Informan dan Key Informan.....	43
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	46
IV.1 Struktur Organisasi Kelurahan Bambu Kuning.....	55
IV.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Bambu Kuning.....	56
V.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.2 Identitas informan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
V.3 Identitas informan berdasarkan tingkat Umur.....	61



**DAFTAR GAMBAR**

Tabel	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Wawancara Penelitian .....	87
Lampiran 2	Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa .....	93
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	94
Lampiran 4	Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.....	95
Lampiran 5	Surat Keterangan Kelurahan Bambu Kuning .....	96
Lampiran 6	Surat Keterangan Kelurahan Tuah Negeri .....	97
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian.....	98

### SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau  
Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Fuad Fathin Fadhilillah  
 Npm : 157310331  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)  
 Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun  
 Warga ( PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian kprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2020  
Pernyataan

Fuad Fathin Fadhilillah

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA**

**ABSTRAK**

**Fuad Fathin Fadhilillah**

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola pikir mereka dengan adanya program tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif , Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks,melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan,serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis, dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data , dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya. dikategorikan Kurang baik dimana dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga ini ini masih terdapat beberapa hambatan beberapa seperti Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan ini,sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti dalam pelatihan budidaya ikan bibit mengalami keterlambatan sehingga menunja program yang di jalankan. Kemudian disarankan Kepada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan raya untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PMB-RW ini, dengan meningkatnya pertisipasi masyarakat maka tujuan dari program ini akan terlaksana dan juga terkait dengan sarana pendukung dalam pelaksanan PMB-RW ini harus lebih di perhatikan agar program tersebut tidak terhambat dalam pelaksanaannya

Kata Kunci : Implementasi, Program , PMB-RW, Kelurahan, Pendamping Program , masyarakat

**IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM  
BASED ON RUKUN WARGA (PMB-RW) IN KECAMATAN TENAYAN  
RAYA**

**ABSTRACT**

**Fuad Fathin Fadhilillah**

The Community Based Community Empowerment Program (PMB-RW) is a tangible manifestation of community empowerment carried out by the Pekanbaru City government in order to reduce poverty and empower people who have a weak economy so that it is hoped that the community can change their economic life from their mindset with the existence of the program. The purpose of this study is to describe the Implementation of Community Empowerment Programs Based on Community Rukun Warga (PMB-RW) in Tenayan Raya District. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis techniques, qualitative research is a process that is more intended to understand human problems in a social context by creating and presenting a comprehensive and complex picture, reporting detailed views of informant sources, and carried out naturally without any intervention from the author, with interviews and observations as data collection tools, with the results of the research drawing conclusions, namely in the Implementation of Community-Based Community Empowerment Programs (PMB-RW) in Tenayan Raya District. categorized as Not good where in the implementation of the Community-based Community Empowerment Program there are still several obstacles such as the lack of community participation in participating in this empowerment program, less supportive facilities and infrastructure such as in seed fish cultivation training have been delayed so that the program is running. Then it is suggested to every sub-district in Tenayan Raya Subdistrict to further increase the socialization to the community related to this PMB-RW, with increasing public participation the purpose of this program will be implemented and also related to supporting facilities in implementing this PMB-RW should be more pay attention so that the program is not hampered in its implementation

**Keywords:** Implementation, Program, PMB-RW, Kelurahan, Program Assistant, community

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan menurut Pasal 9 terbagi atas urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan *konkruen* dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, antara lain:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan;
- c. keamanan
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama

Sedangkan urusan pemerintahan *konkruen* merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dan didalam ayat (2) yang berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkunganhidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Salah satu tujuan utama didirikannya sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi berbagai macam fenomena dalam kehidupan bernegara terkadang belum mampu melepaskan sebuah negara termasuk Indonesia dari mata rantai kemiskinan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, dan memiliki penduduk berjumlah 1.091.008 jiwa (*Sumber Kantor Badan Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2019*), dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka Kota Pekanbaru membagi menjadi 12 Kecamatan yang di pimpin oleh masing-masing camat , Kota Pekanbaru dengan Penduduk yang banyak dengan mobilitas yang tinggi dalam hal ini tidak bisa pungkiri juga masih banyak masyarakat yang masih masuk dalam kategori Kurang mampu. Menurut Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru (2016:3). Saat ini kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaa

dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya.

pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

Adapun tujuan dari Program PMB-RW ini adalah menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta dalam pelaksanaan Program PMB-RW ini agar tujuan dari Program PMB-RW tersebut tercapai.

PMB-RW pada prinsipnya merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru. Dana yang disalurkan tidak dikelola secara sendiri oleh RW penerima bantuan. Selain itu tenaga pendamping, Lembaga Keswadayaan Masyarakat RW (LKM-RW) yang dipercayai sebagai pemegang Dana PMB-RW bersama RW.

Menurut Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2014 tentang PMB-RW bahwa prinsip pelaksanaan PMB-RW melalui Tridaya, yaitu :

1. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat.
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera.
3. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. maka dari itu dikeluarkan lah keputusan walikota dengan program PMB-RW. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintah maupun bagi masyarakat, sehingga sumber informasi yang berkembang adalah bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Kecamatan Tenayan Raya memiliki 12 Kelurahan dan memiliki 48 Rukun Warga (RW) yang berhak mendapatkan program PMB-RW. Pada Kelurahan Bmabu Kuning sendiri memiliki 13 RW dan 50 RT, Penduduk setiap RW didata dan menurut data terakhir berjumlah 18.682 jiwa. Penduduk Kelurahan Bambu

Kuning berdasarkan data terakhir, terdiri dari 3.578 KK, untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dari 18682 jiwa, sebanyak 9191 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 9491 berjenis kelamin wanita. Sedangkan di Kelurahan Tuah negeri ini terdapat 7 RW dan 24 RT dengan jumlah jiwa sebanyak 5,011 jiwa. Di dalam program PMB-RW terdapat 3 aspek yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama adalah pemberdayaan sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pos ronda dan renovasi balai pertemuan. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan pada pemberdayaan sosial maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya pemberdayaan ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera. Pada Kecamatan Tenayan raya ini belum ada aspek ekonomi yang dilaksanakan. Seharusnya aspek sosial ini sangat diperlukan karena masyarakat dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah, pengembangan industri kecil, simpan pinjam dan koperasi.

Dan yang terakhir adalah pemberdayaan lingkungan yang meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Adapun kegiatan yang telah dijalankan di Kecamatan Tenayan Raya adalah Pembuatan posyandu dan pembuatan gorong-gorong. Dengan adanya pembangunan pada pemberdayaan lingkungan ini maka Rukun Warga dapat berinovasi dalam mengembangkan dana yang diberikan Pemerintah Kota dan bisa merealisasikan pengembangan dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini ketentuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) meliputi antara lain, Tahapan Persiapan, Tahapan Sosialisasi, tahapan Perencanaan dan tahapan Pelaksanaan Kegiatan untuk warga yang ingin mengikuti program ini masyarakat cukup mendaftarkan diri ke RT masing masing. Dalam pelaksanaannya Kelurahan selaku Koordinator berkoordinasi dengan pendamping PMB RW serta mitra kelurahan yaitu RT dan RT dalam menjalankan Program PMB-RW ini dengan tujuan meningkatkan Perekonomian dan Kemampuan Masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Tuah Negeri dan Bambu Kuning sebagai Fokus penelitian.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang tepat adalah melalui Program PMB–RW Kota Pekanbaru Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). PMBRW mulai di laksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2014. Sesuai dengan peraturan Walikota maka program PMB-RW tersebut mempunyai perlaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2. Meningkatkan sosial kaum miskin
3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat
4. **Pemberdayaan dan pembangunan kapasitas lokal**

**Tabel I.1 Rekapitulasi Kegiatan pelatihan PMB-RW tahun 2020 yang terlaksana di Kecamatan Tenayan Raya.**

NO	Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Kulim	4	15
2	Rejosari	3	50
3	Tangkerang Timur	5	10
4	Bambu Kuning	1	5
5	Sialang Rampai	2	10
6	Perbatuan	3	20
7	Mentangor	3	19
8	Bencah Lesung	0	0
9	Tuah Negeri	4	25
10	Melebung	0	0
11	Industri Tenayan	2	16
12	Pematang Kapur	0	0
<b>Jumlah</b>		17	135

Sumber Laporan Persentase Evaluasi Kinerja Pendamping PMB-RW 2019

Dari data tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa dari 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya masih ada beberapa kelurahan yang belum menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini, kita lihat dari hasil rekapitulasi pelatihan PMB-RW baru 6 Kelurahan yang menjalankan program ini. PMB –RW ini di peruntukan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan, dengan demikian mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat, penggunaan bantuan itu sendiri, ditetapkan melalui rapat musyawarah RW yang nantinya di SK kan dengan surat sebagai lembaga penyelenggara. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak hanya untuk usaha , pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, dana PMB-RW juga bisa digunakan dalam bentuk simpan Pinjam dan pembangunan fisik secara mendadak dan pada kelurahan Buah Negeri ini sendiri bentuk Program PMB-RW yang telah

di jalankan itu seperti diberikan pelatihan pemahiran keterampilan menjahit lanjutan yang di ikuti oleh masyarakat,yang di harapkan agar dapat mengembang ilmu yang sudah di dapat agar bisa di berdayakan dan di praktikan dengan harapan warga bisa membuka toko dan rumah-rumah jahit,agar pelatihan yang di berikan tidak sia-sia dan dalam program ini di kelurahan Tuah negeri terdapat pula program dibidang simpan pinjam untuk warga kiranya melakukan pinjaman modal untuk membuka usaha. Dalam Penelitian ini Peneliti memfokuskan lokasi penelitian pada dua Kelurahan yakni Kelurahan Bambu Kuning dengan alasan pada Kelurahan ini tidak berjalannya Program PMB-RW dan yang kedua ada Kelurahan Tuah Negeri dengan Alasan Kelurahan tersebut sudah menjalankan PMB-RW.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Pemberdayaan masyarakat PMB RW di kerulahan Bambu Kuning di lihat dari data Jumlah Program yang di jalankan serta jumlah peserta.
2. terindikasi adanya Kelurahan di Kecamatan Tenaya Raya yang tidak Menjalankan Program PMB-RW

Berdasarkan Fenomena Diatas dan Kondisi dalam Pelaksanaan Program pemberdayaa Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya yang mempunya hambatan masih Kurangnya Sosialisasi yang di berikan dari Pemerintah terkait dengan Pelaksanaan Program PMB-RW ini dan terindikasi adanya kelurahan yang tidak menjalankan Program PMB-RW di Kecamatan

Tenayan Raya, Sehingga Peneliti Tertarik untuk Mengkaji lebih dalam tentang **“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah untuk mempermudah ruang lingkup masalah yang akan dikaji agar peneliti bisa fokus pada satu masalah yang di kemukakan. Adapun rumusan masalahnya, yaitu :”**Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan raya ?**” Dengan beberapa Hambatan dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh RT dan RW di Kelurahan Tuah Negeri sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)
2. Kurangnya Sarana Pendukung dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) .

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kendala dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik, Penelitian di harapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
- b. Secara teoritis, Penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Pemerintahan.
- c. Untuk penulis sebagai salah satu syarat tugas akhir perkuliahan serta menambah ilmu,

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi kepustakaan

##### 1. Pemerintahan

Rahyunir Rauf (2017;221).Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksana tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan umum yang telah ada maa pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Sri Maulidiah (2014;3) Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan.

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010;18) bahwa; “secara umum pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undangundang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki; a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.

b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will) c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Lebih lanjut tentang pemerintahan dinyatakan oleh Sadu wasistiono (2015;41), bahwa; salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut Admosudirdjo (1989:182) management pemerintahan management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya managemen dari pada *government staff work*, *management* kepolisian, management dari pada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintahan secara umum adalah, Musenaf (1992:22)

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan.

b. pembinaan masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di sebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Nugroho (2003:36) menjelaskan pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan. Sedangkan menurut Life pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah, kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: mampu mempunyai kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. pendefenisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kemasyarakatan swial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosial. (dalam, suharto 1997:62)

Selanjutnya menurut Awang dan Wijaya (2012;6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan,sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia,berhak menerima layanan civil tertentu,dan pemerintah wajib menjalankan.

Sedangkan menurut C.F Strong (dalam syafiie 2013;31) pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan.disamping Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politica) yaitu kekuasaan eksekutif,legislatif dan yudikatif.

Menurut Budiardjo (2008;21) pemerintahan dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah negara kekuasaan ,pengambilan keputusan,kebijakan dan.pengambilan,atau alokasi.

## 2. Ilmu Pemerintahan

Maulidiah (2014:1-2) secara umum pemerintahan yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan pernyataan yang sah oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni Pelayanan.

Menurut Nia Kurniati (2015:208) Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerinthaan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhandan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan

dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan Petrus Polyando (2016:50).

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu seni dikatakan ilmu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

### **3. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untk melakukan atau tidak melakukan . konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dikenal oleh pemerinah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerinta menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui jalan itu rusak dan pemerintah tidak membuat kebijakan memperbaikinya bearti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintahan.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun di sadari bahwa kebijakan publik dapat di pengaruhi oleh para aktor di luar pemerintahan.

kebijakan publik adalah tidakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Taufiqqurohman, 2014;49).

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (Islamy, 2000:17).

Menurut William Dunn dalam Abdul Aziz (2013;3) setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Mary Isomawati Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Lingkup kebijakan publik dapat dikatakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan dan lain sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun

lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota.

kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap public problems (Yulianto Kadji, 2015; 16).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang bersifat intelektual. Proses kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003:24-25) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini pejabat yang di pilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, pada tahapan ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

#### 4. Implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yag lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini, peneliti menggunakan Teori George C Edward III sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Ilham Arief Sirajuddin, 2014;3)

Dalam pandangan Goerge C.Edward III (dalam Sujianto,2008:15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses ? untuk itu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Komunikasi  
Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran
2. Sumber Daya  
Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan ( telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau

informasi ) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap ( Disposisi)  
Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi
4. Struktur Birokrasi  
Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

### **5. Konsep Pemberdayaan**

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tenang dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai

pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*)” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan

akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya Prijono dan Pranarka, (1996:297). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang

muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber– sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:297), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999:133), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998:143) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai

dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah

dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Kartasmita, (1996: 7).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi

juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

Menurut Widjaja (dalam Rauf dan Munaf 2015;123) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau pemberian modal saja, tetapi di ikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat,

mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses:

1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Sedangkan menurut Webster (dalam Sedarmayanti 2013;59) pemberdayaan adalah kata Empower mengandung dua arti, pengertian pertama adalah to give power or authority to dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus.

Slamet juga mengemukakan pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (dalam Totok 2012;100)

Di dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, Mathews menyatakan bahwa:”Prinsip adalah suatu pertanyaan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten” karena itu prinsip akan berlaku umum dan dapat diterima secara umum,dan sudah di yakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.(dalam Totok 2012;105)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. Bina manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan. Seperti:

- a) Pengembangan kapasitas individu
- b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan
- c) Pengembangan kapasitas sistem (jejaring)

b. Bina usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina usaha yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya hanya bisa manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.(dalam Totok 2012;114-115)

c. Bina lingkungan

Selama ini pengertian lingkungan sering kali di maknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Bina kelembagaan

Hayami Kikuchi (dalam Totok 2012;116) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang di taati oleh anggota suatu komunitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafia berarti kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen(dalam Totok 2012;39)

Suharto (2006; 58-59) mendefenisikan pemberdayaan antara lain adalah:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas di arahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006; 67-68) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dan pemberdayaan yang dilakukan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dan yang di perintah. Di dalam hubungan tersebut diperlukan berbagai program pemberdayaan, yaitu:

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan bargaining position yang di perintah terhadap pemerintah. Melalui berganing

tersebut, yang di perintah mendapatkan apa yang merupakan hak nya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang di perintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia ( human dignitiry), penggunaan ( human utilization) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksud kan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang di perintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Menurut Thoha (2003:7-9) pembinaan adalah suatu tindakan,proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu bisa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Dan menurut Efendi (2003:24) bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang, perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung

termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial, sehingga mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Sedangkan menurut Santoso (2005:52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Efendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

- a. Bimbingan
- b. Pengawasan
- c. Pengarahan
- d. Pelatihan

## **6. Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan menurut Sulistyani (2004:80) berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang

atau belum berdaya. Rappaport (1984:198) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Definisi yang senada juga menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003)<sup>1</sup>

Bila melihat dari adanya beberapa pengertian di atas, bisa terlihat bahwa terdapat perbedaan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh Ambar Teguh S mencakup tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Berbeda dengan yang dimiliki Djohani dan Rappaport yang lebih menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, pemberian wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan, potensi, kemampuan, dan keinginan yang dimiliki.

Proses pemberdayaan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat akan segera terwujud, dimana masyarakat berperan sebagai subjek dari pembangunan dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator saja. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat tidak serta merta berhenti sampai di sini saja. Seperti yang sudah dikemukakan pada awal paragraf, pemberdayaan merupakan membangun sumber daya manusia untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan juga budaya secara bertahap dan terjaga. Terjaga di sini berarti bahwa masyarakat yang sudah mandiri tetap memerlukan perlindungan dan pengawasan agar tidak mengalami kemunduran, sehingga terbentuklah kedewasaan sikap masyarakat.

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Menurut sulistiyani (2004:80), kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat ditandai dengan

kemampuan masyarakat untuk memikirkan,meutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah- masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Ketiga kondisi tersebut hendaklah diarahkan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
2. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku amsyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.
3. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.
4. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan/keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Kondisi diatas diperlukan sinergi dan pengembangan melalui intervensi dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk membangun kompetensi masyarakat agar dapat berkembang dan keluar dari jarimng kemiskinan. Untuk melengkapi komunitas yang baik tersebut, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan , sebagaimana dijelaskan oleh Sulityani (2004:80), yaitu :

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui
4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Tujuan pemberdayaan sebagaimana dijelaskan diatas mengutamakan pada kemandirian masyarakat. Kemandirian ini dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya degan adanya intervensi dari pihak luar , menjaring kemitraan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang kedepannya diasumsikan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.

- b. Tahap-tahap pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan terhadap pihak yang lemah saja, akan tetapi terdapat sebuah proses untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga dapat berdaya dan memiliki daya untuk hidup secara mandiri. Menurut Ife (1995:12), pemberdayaan adalah lebih kepada menyiapkan masyarakat akan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Bila melihat dari apa yang telah dipaparkan baik oleh Sulistyani ataupun Ife, terdapat sebuah persamaan, dimana keduanya ada sebuah proses untuk menghasilkan atau mengarah kepada sesuatu yang berkaitan dengan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik *knowledge*, *attitude*, maupun praktik

menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.<sup>3</sup>

Menurut Sulistyani (2004:80) terdapat pemberdayaan masyarakat berjalan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penulis terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang di pakai di dalam nya. Dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yang di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis,

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu**

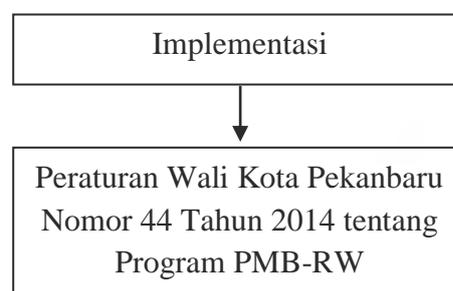
No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Evi Zubaidah, Elma Fikri Lubis (2018)	Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga( PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan	Menggunakan metode Deskriptif kualitatif	Pada penelitian ini menggunakan Konsep dari MerileeS. Grindle dan penelitain sebelumnya

		Kota Pekanbaru		menggunakan teori Edward III
2	Fitria Ramadayani,Zalili Rusli (2018)	Efektifitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga(PMB-RW)	Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Pada penelitian ini bentuk programnya di bidang pembangunan sedangkan penelitian sebelumnya di bidang Simpan Pinjam
3	Zubaidah Evi (2019)	Efektivitas Program Pembedayaa Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya di Kota Pekanbaru	Jenis Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Pada penelitian ini menggunakan Konsep dari Gibson dan penelitain sebelumnya menggunakan teori Edward III
4	Fahrulauza'i (2018)	Implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Rarga dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan Renayan Raya	Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PMB-RW sedangkan penelitian sebelumnya pada keseluruhan warga dalam pelaksanaan PMB-RW

### C. Kerangka Pikir

Dari beberapa penjelasan konsep teori dan teori dalam studi perpustakaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan kerangka pikir penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar II.I : Kerangka Pikir**



↓

Goerge C.Edward III dalam Agustino  
(2008: 149 )

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

↓

Terlaksananya Program PMB-RW  
di Kecamatan Tenayan Raya

#### **D. Konsep Operasional**

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan di uji melalui teknik pengukuran Adapun konsep – konsep yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah semua badan atau orgainsasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di sebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlingdungan kebutuhan dan kepentingan manusai dan masyarakat

2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat selaku perangkat daerah kabupaten / kota
3. Kebijakan public adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan
4. Pemberdayaan adalah sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
5. Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial
6. Implementasi adalah pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu undang, namun juga dpat berbentuk instruksi eksekutif yang penting atau perundangan
7. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementer mengetahui apa yang harus di lakukan.
8. Sumber daya adalah walaupun isi kebijakan sudah di komunikasi secara jelas dan konsinten, apabila implemantator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implemtasi tidak akan berjalan efektif
9. Disposisi atau sikappara pelaksana adalah watak dan karakteristik yang di miliki oeh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
10. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam mempengaruhi dalam implementasi program atau kebijakan yang mencakup struktur birokrasi,norma dan pula hubungan.

### E. Operasionalisasi Variabel

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Impementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
--------	----------	-----------	---------------

<p>George C.Edwards III menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru</p>	<p>Komunikasi</p> <p>Sumber Daya</p> <p>Disposisi Birokrasi</p>	<p>a.Adanya sosialisasi</p> <p>a.Tersedia personil yang cukup</p> <p>b.Tersedianya fasilitas yang mendukung</p> <p>a. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya</p> <p>a.Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang di miliki instansi terkait</p> <p>b.Adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan</p>
---	---	---	--

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan, serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis ( Creswell.2014;15)

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategi, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif ( Locke dalam Creswell.2014;229)

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru dan Tempat Penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan data, Informasi, Keterangan, serta hal hal yang berkaitan dengan kepentingan Penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu pada Kantor Kelurahan Tuah Negeri dan Kantor Kelurahan Bambu Kuning , sesuai dengan Permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) peneliti ingin

melihat Perbandingan dalam Pelaksanaa Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kedua Kelurahan tersebut.

### C. Informan dan Key Informan

Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informa dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta informasi objek yang ingin di teliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purpose sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang di tunjuk mengetahui serta memahami masalah. Maka , dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

**Tabel III.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan
1	Camat Tenayan Raya	Informan Kunci
2	Lurah Kelurahan Bambu Kuning	Informan
3	Lurah Kelurahan Tuah Negeri	Informan
4	Masyarakat yang menjalankan Program PMB-RW	Informan

*Sumber: Modifikasi Penulis 2020*

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumber utama dilapangan, melalui wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri dan Lurah Kelurahan Bambu Kuning ,RW di Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu

Kuning dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Seperti Bentuk Programnya, Sosialisasi yang di berikan serta Pembinaa yang di berikan.

## 2. Data Sekunder

Yaitu sumbernya adalah dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini yaitu dokumen yang diperoleh melalui perpustakaan, instansi/kantor Kecamatan tenaya Raya, Kantor Kelurahan di Tuah Negeri dan di Kelurahan Bambu Kuning, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Buku-Buku, Laporan-Laporan penelitian yang sudah ada serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan:

### a. Wawancara

Wawancara yang di lakukan oleh peneliti baik secara lansung (face to face ), melalui telepon atau media lainnya, maupun terliba secara langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara ( Creswell,2014:267)

b. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung kelapangan atau lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti, peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data. Peneliti dapat terjun langsung menjadi partisipan untuk mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-partisipan (Creswell, 2014; 267)

c. Dokumentasi

Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-kata dari partisipan dengan mengakses dokumen-dokumen pribadi dari partisipan, peneliti akan memahami pola bahasa yang dimiliki partisipan, baik secara verbal maupun bahasa perilaku sehingga memudahkan peneliti untuk mengkaji permasalahannya yang berkaitan dengan partisipan dengan baik. Selain itu dokumentasi sebagai bukti tertulis yang dapat diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peneliti (Creswell, 2014; 268)

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

### G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenaya Raya.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP			■	■																
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissioner																				
5	Rekomendasi Survaiv																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisi Data																				
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

## **H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai antara satu dengan yang lainnya yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini membahas landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan di uraikan kerangka pikir, konsep operasional dan operasional penelitian

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

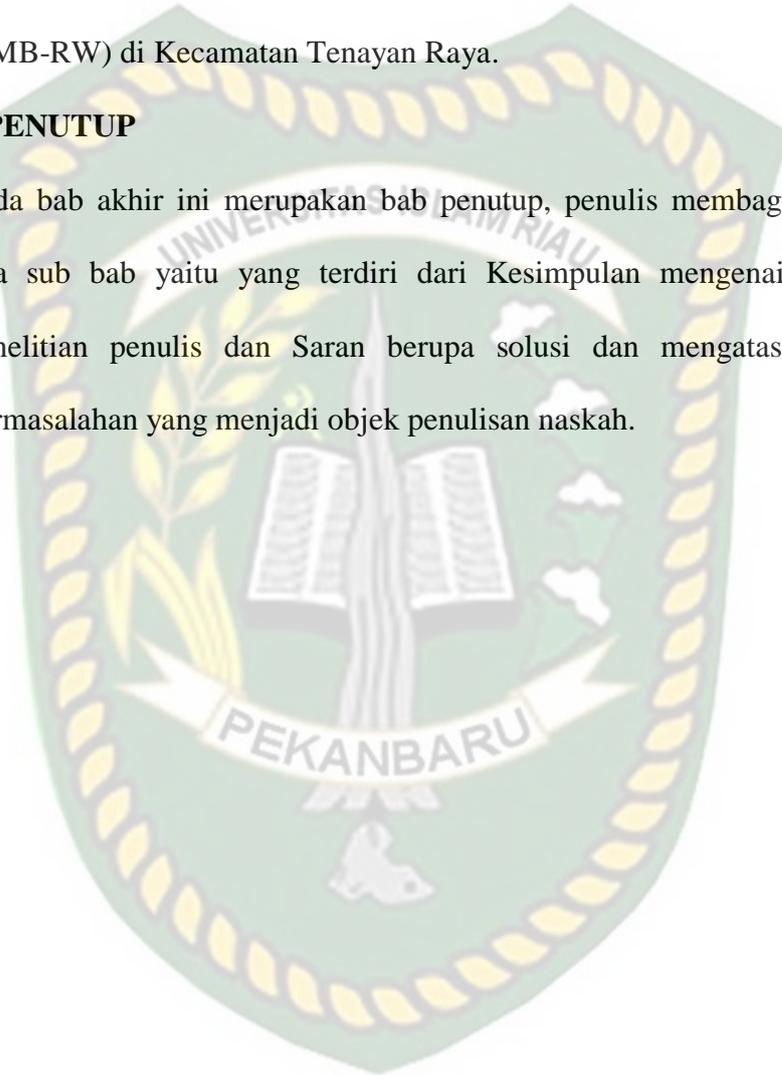
Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Kota Pekanbaru. Fungsi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.

## **BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab akhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya dalam dua sub bab yaitu yang terdiri dari Kesimpulan mengenai ringkasan penelitian penulis dan Saran berupa solusi dan mengatasi sejumlah permasalahan yang menjadi objek penulisan naskah.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya didirikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.13A. Visi Kecamatan Tenayan Raya Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya Sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru Yang Madani Melalui Pemberdayaan. B. Filosofi dengan Visi Yaitu Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : mempunyai arti bahwa cita-cita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota “Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan Infrastruktur yang baik”

Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropolitan Pekanbaru. 3. Yang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 4 Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Sail
- b. Kelurahan Rejosari
- c. Kelurahan Kulim
- d. Kelurahan Tangkerang Timur

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk ajar agama, budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya didirikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

#### **B. Visi Kecamatan Tenayan Raya**

Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan.

#### **C. Arti Filosofi Dengan Visi**

Yaitu Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : mempunyai arti bahwa cita-cita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota “Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan

Infrastruktur yang baik”Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropiltan PekanbaruYang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sail
2. Kelurahan Rejosari
3. Kelurahan Kulim
4. Kelurahan Tangkerang Timur.

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk ajar agama, budaya dan hukumyang berlaku di kota Pekanbaru.Maka Misi Pembangunan Kecamatan Tenayan Raya 2014 –2019 adalah :

1. Menjujung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bermarwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
2. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik.
3. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.

4. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.

Camat yang telah memimpin di Kecamatan Tenayan Raya dari tahun 2003 sampai dengan saat ini :

1. Tarmizi Ahmad, S.IP (2003 -2005)
2. H. Drs. Edi Satria, M.Si (2005 –2007)
3. Drs. Daryuzar (2007 –2009)
4. PLT. Adi Suaka, S.Sos (2009)
5. Sadri, S.Sos (2009 –2010)
6. Azwan, S.Sos (2010 –2012)
7. H. Abdurrahman, S.Sos, M.AP 2(2012 -2015)

#### **D. Gambaran Umum Kelurahan Bambu Kuning**

Di Kecamatan Tenayan Raya terdapat 13 (tiga belas) Kelurahan hasil dari pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 yakni; Kelurahan Bambukuning, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Kulim, Kelurahan Mentangor, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialangrampai, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Pematangkapau, Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Sialangsakti, Kelurahan Tuahnegeri, Kelurahan Industritenayan, dan Kelurahan Melebung. Kelurahan Bambukuning salah satu kelurahan hasil dari pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016. Secara resminya kelurahan Bambukuning berdiri pada Tanggal 03 Januari

2017. Luas wilayah Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru saat ini adalah  $\pm 5,24$  KM<sup>2</sup>, dan memiliki ketinggian wilayah 06 M Dpl ( Diatas permukaan Laut ). Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2017, Kelurahan Bambukuning memiliki batas : 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Teleju, Kelurahan Industri Tenayan, Jl. Tenayan Jaya, Jl. Sail. 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Limapuluh. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hang Tuah Kelurahan Rejosari. 4. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak (Kel. Limbugan, Kecamatan Rumbai Pesisir)

Motto Kelurahan Bambukuning dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yakni, CANTIK : Cepat, Amanah dan Adil, Netral, Transparan dan Terpercaya, Inovatif dan Integritas, Kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan.

Visi Misi Kelurahan Bambukuning Sama halnya dengan lembaga – lembaga yang lain, kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, memiliki visi yang ingin dicapai dan memiliki misi untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kelurahan Bambukuning dalam pelaksanaan administrasi dan melayani masyarakat. Adapun visi dan misi kelurahan Bambukuning sebagai berikut:

#### **E. Visi**

Menjadikan Kelurahan Bambukuning Terdepan dalam pelayanan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Menuju Masyarakat yang Aman,

Damai, Sehat serta Berkualitas. Misi 1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Bambukuning 3. Mewujudkan Pembangunan masyarakat yang Partisipatif 4. Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan

#### **F. Struktur Organisasi Kelurahan Bambukuning**

Seperti halnya suatu organisasi yang baik, kelurahan Bambukuning memiliki struktur organisasi guna menciptakan sistem dalam pelaksanaan melayani masyarakat. Seperti adanya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi – seksi lainnya. Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Laksana (STOK), susunan Organisasi Kelurahan Bambukuning adalah sebagai Berikut :

1. Lurah
2. Sekretraris Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, sturktur organisasi Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dapat di lihat pada Tebel IV.1

**Tabel IV.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

NO	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	ABDULLAH,S.STP NIP.199101172012061001	III/c	Lurah
2	REKA KURNIAWATI NIP. 199209192015072002	III/b	Seklur
3	Sariati S.Pd NIP.196901111989032002	III/b	Kasi Pemerintahan
4	ASIFUDDIN NIP.198006292007012007	III/b	Kasi PPM
5	R.R SRI LESTARI NIP.196011081981012007	III/c	Kasi Kesra
6	RONNI.W NIP. 197606192007011003	II/c	Staf
7	MARDISON NIP.19830929200901005	II/c	Staf
8	MARHAN SALEH	-	Kebersihan kantor
9	MOHD.SYHRUL FAHMI	-	Penjag kantor

#### **G. Jumlah Penduduk Kelurahan Bambu kuning**

Adanya lembaga berupa kelurahan bertujuan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Berdomisili, Surat Pindah, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin, Surat Keterangan Domosili Usaha, Rekomendasi Surat Keterangan Izin Usaha (SITU), SKGR Tanah, dan lain-lain.

Kelurahan Bambukuning kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, memiliki 13 RW dan 50 RT. Penduduk tiap RW didata dan menurut data terakhir berjumlah 18.682 jiwa. Penduduk Kelurahan Bambukuning berdasarkan data terakhir, terdiri dari 3.578 KK. Untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, dari 18.682 jiwa, sebanyak 9191 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan

9491 berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Bambu Kuning**

Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
3578	9191	9491	18.682

Jumlah penduduk sebanyak 18.682 jiwa itu, tersebar dalam 13 RW di kelurahan Bambukuning. Tiap RW memiliki beberapa RT. Kelurahan Bambukuning memiliki 50 RT. RW dan RT juga bertugas untuk melayani masyarakat. Selain itu, RW dan RT menjadi pengontrol yang lebih dekat dengan masyarakat mengingat cakupan kelurahan yang luas.

#### **H. Gambaran Umum Kelurahan Tuah Negeri**

**Tuah** adalah Sesuatu keberuntungan, kelebihan dan harapan yang tidak diduga-duga. Dahulunya daerah tersebut merupakan hutan belantara yang banyak terdapat binatang buas (Badak,Dil) yang disebut Jalan Badak dan sekarang berkembang sebagai daerah Pusat Pemerintahan, oleh karena itu dinamakanlah daerah tersebut **Tuah Negeri**.

Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan Kelurahan yang merupakan Kelurahan mekaran dari Kelurahan induk yakni perpecahan dari Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2003 tentang pemekaran

Kelurahan dari 40 menjadi 58 Kelurahan dan salah satunya adalah Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya.

Tuah Negeri sebagai Kelurahan diresmikan pada Tanggal 17 Juni 2003. Sejak saat itu hingga saat ini telah terjadi penggantian kepemimpinan Kelurahan sebanyak 7kali. Adapun kepala lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya , yaitu :

1. Bapak Bustami Simatdengan masa jabatan Tahun 2003-2007
2. Bapak Trisepna Putra, S.STp dengan masa jabatan Tahun 2007-20103.
3. Bapak Nurhasminsyah, S.STp, M.Si dengan masa jabatan 06 Januari 2011 sampai 15 September 2011.
4. Bapak Raja Dendri dengan masa jabatan 2012.
5. Bapak Wahyu Idris, S.Hut. dengan masa jabatan 2012-2014.
6. Bapak Syamsukamar, S.Pddengan masa jabatan Tahun 2014-2016.
7. Ibu Defna Leony, S.IP, M.Si dengan masa jabatan Tahun 2016 hingga sekarang.

Kelurahan Tuah Negeri memiliki Visi : “Terwujudnya Kelurahan Tuah Negeri sebagai Kelurahan pelayanan prima, bersih,Agamis serta madani”. Kemudian misi Kelurahan Tuah Negeri : “Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, pelaksanaan sosialisasi taat pajak dan distribusi, pelaksanaan gotong royong masyarakat secara rutin, terciptanya prilaku hidup bersih dan sehat di berbagai kegiatan, mendorong dan mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, membangun kemandirian masyarakat dalam tumbuhnya sektor usaha kecil dan menengah”

### 1. Kondisi Geografis

Kelurahan Tuah Negeri merupakan salah satu dari 9 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang memiliki 18 RW dan 84RT. luas Kelurahan Tuah Negeri adalah 18,05 KM2 dengan batas wilayah Kelurahan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :berbatas dengan sungai Panampuan (Kel. Melebung)
- b. Sebelah Selatan : berbatas dengan Jl. Budi Suci Kel. Sialang Sakti
- c. Sebelah Barat : berbatas dengan Jl. 70 (Kel. Bencah Lesung)
- d. Sebelah Timur : berbatas dengan Jl. Budi Suci Ujung (Kel. Kulim)

#### **I. Konsep membangun Kelurahan Tuah negeri**

Kelurahan Tuah Negeri secara ekologi adalah kawasan kombinasi lembah dan dataran tinggi serta didominasi oleh tanah kuning atau tanah liat. Di kawasan ini potensial bisnis produksi batu-batu. Oleh sebab itu perlu upaya modernisasi produksi batu-bata untuk meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya ,terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel V.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dengan persentase 70%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 30%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

## 2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	1	10%
4	SMA	5	50%
5	D1-D3	1	10%
6	D4-S1	1	10%
7	S2	2	20%
8	S3	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

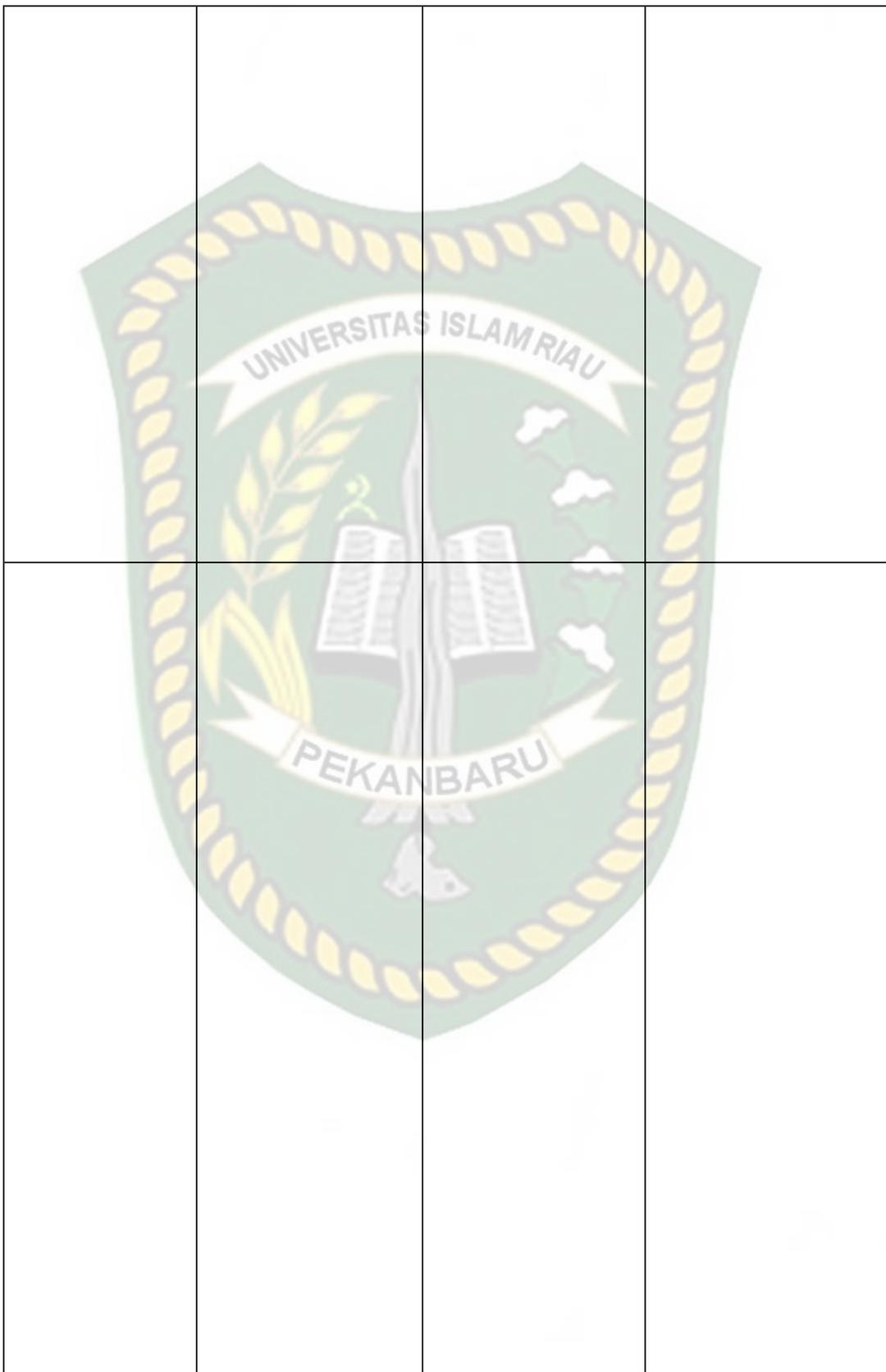
Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 1 orang atau 10%, SMA sebanyak 5 orang atau 50%, diploma sebanyak 1 orang atau 10%, sarjanasebanyak 1 orang atau 10%, dan tingkat pendidikan pascasarjana berjumlah 2 orang atau 20%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah SMA yaitu sebanyak 5orang.

### 3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

#### **Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

	<b>Jumlah</b>		

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 50%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 5 orang atau 50% sudah berumur 41-50 tahun.

**B. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yag lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini, peneliti menggunakan Teori George C Edward III sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Ilham Arief Sirajuddin, 2014;3)

Dalam pandangan Goerge C.Edward III (dalam Sujianto,2008:15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses ? untuk itu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan ( telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi ) tanpa adanya

dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

### 3. Sikap ( Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi

### 4. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

Untuk melihat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupannya sehari-hari. Terutama komunikasi yang terjadi didalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah komunikasi feedback merupakan hal yang diharapkan, untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa latin cum yaitu kata depan yang berarti dengan, bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata-kata itu terbentuk kata benda cummunio yang dalam bahasa Inggris menjadi cummunio yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan. Kemudian berkaitan dengan implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Komunikasi berkaitan dengan adanya sosialisasi yang di berikan oleh Pihak Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning kepada masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Adanya Sosialisasi

Adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam penelitian ini dimaksud Sebagai Pemberian Sosialisasi oleh Pihak Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning di Kecamatan Tenayan raya kepada masyarakat yang bertujuan memberikan informasi awal kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), Sesuai

dengan hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“Dalam Pelaksanaannya untuk Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga atau yang kenal sebagai PMB RW ini untuk tahun 2020 sudah kami sosialisasikan , sosialisasi yang kami berikan ini dengan cara kami mengumpulkan seluruh RT dan RW yang ada di lingkungan Kelurahan Tuah Negeri, dan juga ada Pendamping PMB-RW di sana kami rapat terkait dengan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun warga ini yang akan di jalankan setelah itu baru RT dan RW yang akan langsung memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakatnya masing masing sesuai RT terkait dengan Program yang akan di jalankan yaitu PMB RW , yang mana dalam Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga ini terdapat beberapa bentuk kegiatan seperti Pelatihan dan juga Pembangunan Fisik di Kelurahan Tuah Negeri”*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sosialisasi telah di berikan Pihak kelurahan Tuah negeri dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PMB –RW) kepada masyarakat yang mana ini sangat penting dalam menjalankan sebuah program, selain itu kita juga terdapat hasil wawancara dari Lurah Kelurahan Bambu Kuning , Pada tanggal 21 September 2020 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

*“untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga pada tahun 2020 jelas sudah kami sosialisasikan , sosialisasi itu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah program , sosialisasi ini kami berikan tahapannya sama seperti kelurahan lain yang ada di Kecamatan Tenayan raya, untuk kelurahan kami kelurahan Bambu kuning sosialisasi kami berikan melalui mitra mitra kami seperti RT dan RT serta Pendamping PMB RW yang langsung memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program yang akan di jalan, untuk sosialisasi PMB RW tahun 2021 belum di*

*laksanakan kami saat ini masih menyusun RKP melalui pendamping PMB-RW yang akan di usulkan Ke BAPPEDA setelah di terima program ini baru kami mulai berikan sosialisasi lagi kepada masyarkat khususnya masyarakat Kelurahan Bambu Kuning”*

Berdasarkan hasil wawancara oleh Lurah Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan raya diatas dapat kita ketahui bahwa untuk sosialisasi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini telah diberikan karena tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka program ini tidak dapat berjalan, Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“untuk program PMB RW ini kami sebelumnya memang telah di berikan sosialiasi oleh RT kami , mereka menjelaskan program pemberdayaan yang akan di jalankan oleh Kelurahan Bambu Kuning seperti pelatihan pelatihan menjahit, ada juga melakukan pembangunan fisik di kelurahan bambu kuning ini, dan ini sangat bermanfaat untuk kami”*

Berdasarkan hasil Observasi Peneliti dilapangan bahwa sosialisasi telah di lakukan oleh kelurahan baik kelurahan Tuah Negeri dan Bambu Kuning dalam menjalankan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait dengan indikator Komunikasi dapat kita ketahui bahwa dalam indikator komunikasi ini berkaitan dengan adanya sosialisasi, dan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya khususnya pada kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning untuk sosialiasi terhadap Program

Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) ini masing masing kelurahan bekerja sama dengan mitra mereka dan juga Pendamping PMB-RW untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan ( telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi ) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya. Dalam hal ini sumber daya lah yang mebanut keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Kemudian berkaitan dengan implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Sumber Daya ini berkaitan dengan Tersediannya personil yang cukup serta Tersediannya fasilitas yang mendukung maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

### a. Tersediannya Personil yang cukup

Dalam menjalankan sebuah program harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai salah satunya Tersediannya Personil yang cukup dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, ), Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“Untuk masalah Sumber Daya kami Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga atau PMB RW kami didukung oleh Staf serta mitra mitra seperti RT dan RW dan Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang Cukup memadai, semua elemen tersebut secara bersama mendukung program kita ini ,sehingga program yang dijalankan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya”*

Dari Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah negeri dapat kita ketahui untuk indikator tersedianya personil yang mencukupi ini yaitu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga ini telah di dukung sumberdaya yang cukup seperti staf kelurahan mitra seperti RT dan RW dan juga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara dari Lurah Kelurahan Bambu Kuning , Pada tanggal 21 September 2020 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

*“berkaitan dengan jumlah personil dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun warga di kelurahan Bambu kuning ini saya katakan sudah cukup , sumber daya dalam pelaksanaan program ini ya seperti staf dari kelurahan kemudian RT dan RW yang ada di kelurahan Bambu kuning ini serta pendamping PMB RW “*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Bambu Kuning dapat diketahui bahwa terkait dengan indikator tersedianya personil yang cukup yakni untuk kelurahan Bambu kuning sudah mencukupi. Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“menurut saya ,untuk personil dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini udah memadai ya melihatnya seperti*

*RT dan RW serta pendamping PMB RW berkerja sama dalam menjalankan program ini, dan dalam pelaksanaan program ini kami sebagai peserta program tidak merasa akan kurangnya personil dalam pelaksanaannya.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui untuk indikator Tersedianya personil dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga di kecamatan tampan ini telah memadai dapat di liat dari Hasil wawancara dengan lurah Tuah Negeri dan luah Bambu Kuning kedua kelurahan tersebut dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini di dukung oleh mitra seperti RT dan RW dan juga Pendamping PMB RW oleh karena itu untuk indikator tersedianya personil ini dapat di katakan telah memadai.

b. Tersedianya Fasilitas yang mendukung

Selain sumber Daya dalam menjalankan sebuah program harus didukung oleh juga oleh Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program dalam hal ini berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis RukunWarga, Fasilitas di artikan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan program agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar ), Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“terkait dengan sarana dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga PMB – RW ini sebelumnya kami mengumpulkan mitra kami yaitu Semua RT dan RW kemudian kami minta saran kepada mereka fasilitas apa aja yang di butuhkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini yang mana di*

*sesuai dengan dengan bentuk Program yang akan di jalankan seperti untuk program budidaya ikan sarananya memerlukan beberapa fasilitas seperti terpal dll kemudain untuk pelatihan menjahit kami siapkan semua peralatan menjahitnya dan masih banyak yang lain, jadi untuk fasilitas kami minta saran oleh mitra kami yang di sesuaikan dengan program yang akan di jalankan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Kelurahan Tuah negeri yaitu terkait dengan fasilitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun warga PMB-RW ini di sesuaikan dengan program yang akan di jalankan seperti perlengkapan menjahit ketika ingin menjalankan pelatihan menjahit kita siap peralatan menjahitnya. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara dari Lurah Kelurahan Bambu Kuning , Pada tanggal 21 September 2020 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

*“ untuk fasilitas penunjang dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga PMB RW di kelurahan Bambu kuning kami sesuaikan dengan program yang akan kami jalankan maksudnya seperti ini Pendamping Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga ini menyiapkan yang namanya RKP rencana kegiatan Pemerintah yang kemudian di usulkan kepada BAPPEDA, kemudian mana yang di terima oleh BAPPEDA itu program yang akan kita kerjakan , baru kita persiapkan fasilitas yang di butuhkan dalam program tersebut”*

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya dapat kita ketahui bahwa pada indikator tersedianya fasilitas yang mendukung ini terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB-RW di sesuaikan dengan kebutuhan program yang akan di jalankan , ketika RKP yang di usulkan telah di terima oleh

BAPPEDA makanya itu program yang akan di jalankan kemudian kelurahan akan menyiapkan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaannya Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“Untuk fasilitas kami dalam menjalankan program ini saya rasa udah bagus ya pak artinya kami di dukung oleh fasilitas yang memadai pak seperti program yang sedang di jalankan saat ini pelatihan menjahit, untuk setiap peserta di berikan fasilitas alat menjahit masing masing”*

Sesuai dengan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui untuk indikator tersedianya fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB-RW di Kecamatan Tenaya Raya telah memadai hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan tua Negeri dan Lurah Kelurahan Bambu Kuning. Berdasarkan Observasi peneliti dilapangan bahwa fasilitas di berikan sesuai dengan kebutuhan dari Program yang akan di jalankan seperti perlengkapan menjahit ketika menjalankan pelatihan menjahit.

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait dengan indikator Sumber Daya dapat kita ketahui dalam indikator ini berkaitan dengan yang pertama tersedianya personil serta tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya, terkait dengan tersedianya personil dalam pelaksanaan PMB-RW ini pada Kelurahan Tua Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning didukung oleh Sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan PMB-RW ini yang mana mereka bekerja sama dengan Mitra mereka seperti semua RT dan RW serta juga terdapat

Pendamping PMB-RW yang ada di Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning, kemudian yang kedua terkait dengan tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan PMB-RW ini dari hasil wawancara masih terdapat beberapa kendala seperti dalam pelaksanaan Program Budidaya ikan untuk bibit masih sering kurang dan juga mengalami keterlambatan sehingga menghambat program tersebut.

### 3. Disposisi

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi. Kemudian berkaitan dengan implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Disposisi ini berkaitan dengan Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB-RW maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

#### a. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya

Pada indikator diatas di artikan sebagai masalah atau kendala yang di hadapi oleh Pelaksana Program dalam menjalankan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB-RW kendala ini dapat di akibatkan oleh berbagai faktor yang akan di jelaskan melalui hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“hingga saat ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kelurahan Tuah negeri yaitu kami melalui mitra kami RT dan RW sedikit kesulitan dalam mencari warga untuk di kumpulkan dan mengikuti program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau PMB-RW ini, kendala ini dikarenakan beberapa masyarakat yang ada di kelurahan Tuah Negeri ini bentrok jadwalnya dengan aktivitas atua kerjaan yang mereka jalani saat ini sehingga RT sedikit kesulitan untuk mengumpulkan masyarakatnya.”*

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, terkait dengan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini berkaitan dengan Sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini selain itu kita juga terdapat hasil wawancara dari Lurah Kelurahan Bambu Kuning , Pada tanggal 21 September 2020 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

*“untuk Kendala dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga PMB-RW ini berkaitan dengan anggaran , program yang akan dijalankan juga disesuaikan dengan anggaran yang ada , dengan keterbatasan anggaran yang ada jadi program yang akan di jalankan terbatas”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Bambu Kuning terkait dengan indikator Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak banyak program PMB-RW yang dapat di jalan oleh Kelurahan Bambu Kuning, Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“untuk kendala sejauh ini saya tidak terlalu mengetahui terkait dengan kendala yang di alami pihak kelurahan dalam menjalankan program pemberdayaan ini, kami peserta hanya menjalankan tahapan tahapan yang telah di siapkan pihak pemerintah dalam program ini, namun kadang ada juga kendala seperti dalam pelatihan budidaya ikan, kadang kami lama untuk mendapatkan bibit ikan tersebut, seperti aja kendala yang kami rasakan sebagai peserta dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga PMB-RW ini kendala yang di hadapi untuk di Kelurahan Tuah Negeri ini seperti sulitnya mengumpulkan warga yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga dan untuk di Kelurahan Bambu Kuning kendala yang di hadapi seperti keterbatasan anggaran yang ada sehingga Program-program yang di jalankan terbatas.

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait dengan indikator Disposisi dapat kita ketahui dalam indikator disposisi ini berkaitan dengan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya , pada Kelurahan Tuah Negeri terdapat kendala dalam pelaksanaan PMB-RW ini yaitu terkait dengan cukup sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga hal ini di nilai kerana beberapa masyarakat yang ada dikelurahan sulit membagi waktu dengan aktivitas yang mereka jalankan, kemudian untuk Kelurahan Bambu Kuning terdapat kendala dalam pelaksanaan

PMB-RW ini terkait dengan anggaran sehingga tidak banyak Program yang dapat dijalankan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Menurut Farel Heady (1989), pengertian birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Kemudian berkaitan dengan implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya pada indikator Struktur Birokrasi ini berkaitan dengan adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang di miliki oleh instansi tersebut dan juga adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran Kebijakan. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan fungsi dan wewenang yang di miliki instansi terkait.

Pada indikator adanya kejelasan fungsi dan wewenang yang di miliki instansi terkait yaitu ini diartikan sebagai dalam pelaksanaan Program yang di jalankan oleh Kelurahan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang mana kelurahan sudah jelas memiliki fungsi yang salah satunya melakukan

pemberdayaan masyarakat, hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“terkait dengan kejelasan tugas dan fungsi dari kelurahan itu sudah jelas ya, kami menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini yang mana ini merupakan salah sat fungsi dari kelurahan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat , dengan hal ini kami menjalankan program ini dengan beberapa bentuk pemberdayaan seperti melakukan pelatihan selain itu melakukan pembangunan fisik di wilayah kelurahan Tuah Negeri ini, untuk masyarakat apakah mengetahui akan fungsi ini, saya tekankan bahwa masyarakat juga telah mengetahui , hal ini saya katakan karena fungsi dan tugas kelurahan ini kami sampai kan dalam proses sosialisasi yang dilakukan mitra kami”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Lurah dari Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan raya bahwa terkait dengan kejelasan tugas dan fungsi dari kelurahan dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga PMB-RW ini yang mana instansi tersebut menjalankan program tersebut ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari kelurahan itu sendiri yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara dari Lurah Kelurahan Bambu Kuning , Pada tanggal 21 September 2020 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

*“yaa rasa masyarakat mengetahuinya karna dalam proses sosialisasi yang kami berikan kepada warga kelurahan Bambu Kuning ini sebelum masuk ke masalah program yang akan kami jalankan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk tugas dan fungsi dari kelurahan tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator kejelasan fungsi dan tugas instansi terkait bahwa masyarakat khususnya

masyarakat Kelurahan Bambu Kuning mengetahui akan fungsi dan tugas dari kelurahan hal ini diketahui ketika pihak kelurahan mensosialisasikan program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga yang akan di laksanakan sebelumnya pihak Kelurahan menjelaskan tugas dan fungsi terlebih dahulu. Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“iya benar ketika dalam proses sosialisasi yang diberikan pihak kelurahan bambu kuning melalui RT dan RW kami dijelaskan terkait dengan tugas dan fungsi dari kelurahan itu sendiri, yang mana mereka menjelaskan fungsi kelurahan salah satunya melaksanakan pemberdayaan ,masyarakat, dalam hal ini Kelurahan Bambu Kuning menjalakan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator kejelasan tugas dan wewenang yang dimiliki instansi terkait khususnya untuk Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan bambu Kuning bahwa masyarakat di kelurahan tersebut mengetahui tugas dan fungsi pemerintah tersebut hal ini disampaikan melalui sosialisasi yang di berikan.

b. Adanya Koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan

Dalam menjalankan sebuah Program sangat di butuhkan koordinasi antar pihak yang terkait hal ini agar tujuan dari program tersebut dapat berjalan dengan baik dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB-RW. hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga atau PMB-RW kami berkoordinasi dengan Pendamping PMB-RW seperti kami berkoordinasi dengan Pendamping PMB-RW untuk ke BAPPEDA dan juga ketika ada urusan harus kekecamatan kami juga berkoordinasinya dengan Pendamping PMB-RW dan ketika ingin menjalankan program pembangunan fisik Berkoordinasi dengan Pendamping PMB-RW untuk KE Dinas Pekerjaan Umum”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan Lurah dari Kelurahan Tuah Negeri terkait dengan indikator adanya Koordinas antar pihak terkait dengan sasaran kebijakan, Pihak Kelurahan Berkoordinasi dengan Pendamping PMB-RW terkait dengan Program yang di jalankan, hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Tuah Negeri pada Hari Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

*“seperti yang sebelumnya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini kami mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Bambu Kuning, yang mana kami dari pihak kelurahan berkoordinasi dengan mitra kami RT dan RW serta juga bekoordinas dengan Pendamping PMB-RW, kemudian setelah itu baru kami jalankan program sesuai dengan RKP yang telah disusun bersama Pendamping PMB-RW”*

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dengan Lurah Kelurahan Bambu Kuning terkait dengan indikator adanya koordinasi antar sektor terkait yang mana dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga ini Pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT dan RW serta Pendamping PMB-RW Selain itu Hasil Wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di wilayah kelurahan Bambu kuning ini mengatakan :

*“ Saya selaku RT 001/RW 001 dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga PMB RW ini pihak Kelurahan Berkoordinasi dengan kami, terkait dengan sosialisasi yang akan di berikan kepada masyarakat dan untuk penyusunan RKP pihak kelurahan bambu kuning juga berkoordinas dengan Pendamping PMB-RW”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui koordinasi terus di lakukan dengan tujuan agar Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga PMB-RW ini dapat berjalan dengan baik, Koordinasi yang di lakukan seperti antar pihak Kelurahan dengan Mitra seperti RT dan RW dalam hal Sosialisasi yang diberikan kepada masyarkat dan kemudian Kelurahan juga berkoordinasi dengan Pendamping PMB-RW dalam hal penyusunan RKP.

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait dengan indikator Struktur Birokrasi dapat kita ketahui dalam indikator Sturktur Birokrasi ini berkaitan dengan adanya kejelasan fungsi dan wewenang terhadap instansi terkait dan adanya koordinasi antar sektor terkait dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan raya,terkait dengan adanya kejelasan fungsi dan wewenang dalam menjalankan Program Pemberdayaan berbasis Rukun Warga (PMB-RW) ini Kelurahan menjalan Program ini sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga, dan juga pemberdayaan ini merupakan salah satu fungsi dari Kelurahan,dan untuk adanya koordinasi antar sektor terkait dalam pelaksanaan PMB-RW ini Koordinasi sudah menjadi hal yang wajib dalam pelaksanaan sebuah program , untuk Program PMB-RW ini Pihak Kelurahan berkoordinasi dengan Mitra serta Pendamping PMB-RW seperti Pihak Keluhan berkoordinas dengan Pendamping PMB-RW

dalam penyusunan RKP dan juga ketika ada urusan ke BAPPEDA pihak Kelurahan Bekerjasama dengan Pendamping PMB-RW masing-masing Kelurahan.

Kesimpulan Secara Keseluruhan terkait dengan indikator dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya adalah pada indikator Komunikasi ini dalam pelaksanaan PMB-RW untuk sosialisasi terhadap ini masing masing kelurahan bekerja sama dengan mitra mereka dan juga Pendamping PMB-RW untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk indikator Sumber daya terkait dengan tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan PMB-RW ini dari hasil wawancara masih terdapat beberapa kendala, kemudian pada indikator Disposisi indikator berkaitan pada Kelurahan Tuah Negeri terdapat kendala dalam pelaksanaan PMB-RW ini yaitu terkait dengan cukup sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga hal ini di nilai kerana beberapa masyarakat yang ada dikelurahan sulit membagi waktu dengan aktivitas yang mereka jalankan.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya.**

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya menemui beberapa hambatan dalam

proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh RT dan RW di Kelurahan Tuah Negeri sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Lurah Kelurahan Tuah Negeri yang mengatakan :

*“hingga saat ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kelurahan Tuah negeri yaitu kami melalui mitra kami RT dan RW sedikit kesulitan dalam mencari warga untuk di kumpulkan dan mengikuti program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau PMB-RW ini, kendala ini dikarenakan beberapa masyarakat yang ada di kelurahan Tuah Negeri ini bentrok jadwalnya dengan aktivitas atau kerjaan yang mereka jalani saat ini sehingga RT sedikit kesulitan untuk mengumpulkan masyarakatnya.”*

2. Kurangnya Sarana Pendukung dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang terdapat di Kelurahan Bambu Kuning seperti dalam pelatihan budidaya ikan, untuk bibit terkadang mengalami keterlambatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu warga di kelurahan Bambu Kuning yang mengatakan :

*“untuk kendala sejauh ini saya tidak terlalu mengetahui terkait dengan kendala yang di alami pihak kelurahan dalam menjalankan program pemberdayaan ini, kami peserta hanya menjalankan tahapan tahapan yang telah di siapkan pihak pemerintah dalam program ini, namun kadang ada juga kendala seperti dalam pelatihan budidaya ikan, kadang kami lama untuk mendapatkan bibit ikan tersebut, seperti aja kendala yang kami rasakan sebagai peserta dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini”*

3. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sehingga tidak banyak program yang

dapat di jalankan. Hal ini sesuai dengan Hasil wawancara dengan Lurah dari Kelurahan Bambu Kuning yang mengatakan :

*“untuk Kendala dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga PMB-RW ini berkaitan dengan anggaran , program yang akan dijalankan juga disesuaikan dengan anggaran yang ada , dengan keterbatasan anggaran yang ada jadi program yang akan di jalankan terbatas”*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya bahwa terkait dengan pelaksanaan PMB-RW ini sudah terlaksanan di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya salah satu Kelurahan yang telah menjalankan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yaitu Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning kedua Kelurahan ini telah menjalankan Program ini dengan bentuk Program seperti melakukan pelatihan-pelatihan Menjahit serta Budidaya Perikanan, dan juga terdapat Program pemberdayaan berupa pembangunan fisik, Program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan oleh Kelurahan yang bekerja sama dengan mitra serta berkoordinasi dengan pendamping PMB-RW dalam penelitian ini terdapat 5 indikator yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yaitu indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1. Kurangnya Sarana Pendukung dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang terdapat di Kelurahan Bambu Kuning seperti dalam pelatihan budidaya ikan, untuk bibit terkadang mengalami keterlambatan.
2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sehingga tidak banyak program yang dapat di jalankan.

#### **B. Saran**

1. Disarankan Kepada Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya untuk lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa dan ikut turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)
2. Di sarankan Kepada Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bambu Kuning untuk lebih memperhatikan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program ini, seperti dalam pelatihan budidaya ikan untuk menyiapkan fasilitasnya agar pelatihan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

## DAFTAR PUSATAKA

### A. Buku Referensi

- Abdul Aziz Humaizi. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Dinas Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan*. 3(1):3.
- Admosudirjo, 1989. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Paerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung, Angkasa.
- Agustino. 1980, *Implementing Public Police*. Washington, D.C Robert L.Peabody
- Awang dan Mandra Wijaya, 2012, *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru: Alif Riau.
- Budiardjo, Miriram, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Doddy Tristani, Adityas Putra Rama Wibowo, Achmad Syahroni, Syaifulloh. 2018. Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi Android Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta.
- Dunn N. Wiliam, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gronroos, C. 1990. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington
- Ilham Arif Sirajuddin. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 4(1):3.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2004, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Edisi Kedua, LAN. Jakarta.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maulidiah, Sri, 2014 *Pelayanan Publik (Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan) Bandung*, Indra Prahasta
- Musanef, 1992. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mubyarto. 1998. *Pengantar Ekonomi* . Edisi III. Jakarta :LP3ES.

Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.

*Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.

Kartosasmita.2006. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Graha Ilmu: Yogyakarta

Nia Karniati. 2014. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kasajian Filsafat).*Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (1):2.

Nugroho, D.Riant, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Elexmedia

Petrus Polyando. 2016. Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintah. *Jurnal Politokologi*.3(1).39-50.

Pranaka,1996, Pemberdayaan (Empowerment) kebijakan dan implementasi,CSIS, Jakarta.

Rahyunir Rauf. 2017. Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan*. 3(1): 223.

Ratna Suminar, Mia Aprilliawati. 2017. Pelayanan Prima Pada Orang Tua Siswa Di Sempoa Sip Tc Paramount Summarecon.*Jurnal Sekretari*. 4(2): 10.

Wasistiono, Fernandes Somangungsong. 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas). IPDN Press. Sumedang/Bandung

Sedarmayanti, 2009. *Pelayanann Administrasi Publik*

Sumaryadi, 2008. *Implementasi Kebijakan*. Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru

Syafiie, Inu Kencana, 2001.*Pengantar Ilmu Pemerintahn*,Bandung, PT.Rafika Aditama

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung, PT.Rafika Aditama

Susanto, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sulistiyani dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Totok.Mardikanto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Taufiqqurohman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negera Kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Hal: 49.

Yulianto Kadji. 2014. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Ung Press. Gorontalo.

#### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2016 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga